

## Optimalisasi Program Tanggap *Stunting* dengan Pangan Aman dan Sehat di Kota Bandung dalam Perspektif *Smart City*

<sup>1</sup>Supi Ainul Lutpi, Nanang Suparman, Sakrim Miharja

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; supiainnullutpi@gmail.com

Received: June 07, 2022; In Revised: August 06, 2022; Accepted: August 12, 2022

### Abstract

In order to improve public services, the City of Bandung as one of the cities in Indonesia that has implemented a smart city is increasingly trying to optimize its services, including health services, one of which is in dealing with the problem of stunting. Where in 2020, the stunting rate in the city of Bandung increased to 8.86%. To that end, the Bandung City government created the Bandung Tanginas program (Tanggap Stunting Dengan Pangan Aman Dan Sehat) which is a program aimed at enabling the City of Bandung to become a City with Zero News Stunting. Therefore, the goal to be achieved in this research is to find out how to optimize the Tanginas Program in Bandung City from a Smart city Perspective. This research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that the optimization of the Tanginas program in the city of Bandung seen from the smart city perspective is still not optimal. This is based on the limited amount of healthy food intake, population density, lack of green open space and the lack of use of information technology.

**Keywords:** Smart city, Stunting, Tanginas Program

### Pendahuluan

Saat ini, pelayanan publik menjadi hal yang urgensi bagi masyarakat. Di mana, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, salah satunya ialah pelayanan kesehatan. Untuk itu, pemerintah senantiasa terus berinovasi maupun membentuk berbagai program dalam menunjang kebutuhan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang mana pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik. Menurut Suhartoyo (2019) pelayanan publik ialah pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh aparatur negara dan negara dibentuk oleh publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh (Suparman et al., 2018) bahwasanya pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan dengan bentuk serta *delivery* yang prima dalam arti pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan aman yang ditandai dengan pelayanan yang tidak berbelit-belit, pelayanan yang *well-informed*, responsif, akomodatif, konsisten, adanya kepastian (waktu, biaya, hukum) serta tidak terdapat pungutan tidak resmi.

Dengan begitu, pemerintah senantiasa mengupayakan pelayanan yang efektif dan efisien, hingga menghadirkan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau digital. Dengan adanya transformasi pelayanan publik berbasis digital seperti *e-government*, *digital government* hingga adanya *smart city* yang telah diterapkan pula di beberapa kota di Indonesia, menunjukkan keseriusan pemerintah pusat maupun daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, salah satunya ialah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Mengingat, kesehatan merupakan kebutuhan penting yang secara tidak langsung dapat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia di Indonesia yang lebih produktif secara ekonomi dan sosial. Apalagi dilihat dari beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan *smart city*, di mana derajat kesehatan masyarakat pada kota tersebut menjadi suatu hal penting yang harus diwujudkan.

Beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, akan tetapi hingga saat ini pelayanan tersebut masih belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dinyatakan adanya permasalahan gizi pada ibu hamil, baduta (usia anak 0-23 bulan), balita (anak usia 0-59 bulan), dan pada anak dan remaja (anak usia 5-12 tahun) yang tak kunjung tuntas. Permasalahan gizi tersebut pada akhirnya akan berdampak panjang sehingga menimbulkan permasalahan baru salah satunya ialah menyebabkan *stunting*.

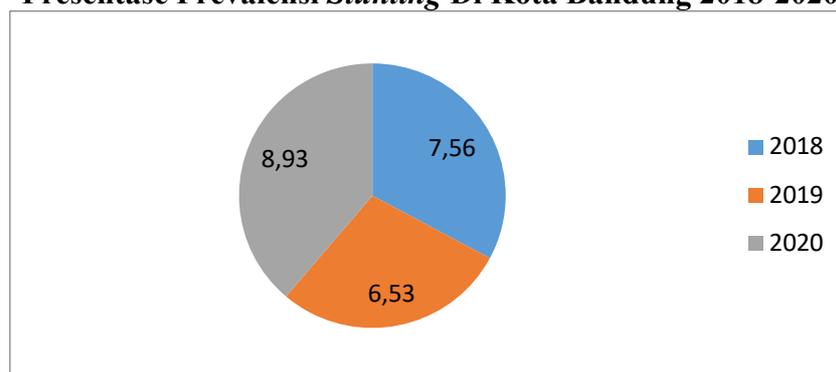
*World Health Organization* (WHO) mendefinisikan *stunting* ialah suatu kondisi pertumbuhan yang gagal pada balita yang mempunyai tinggi badan kurang dari minus 2 standar deviasi median atau standar pertumbuhan pada anak. Balita yang mengalami *stunting* masuk ke dalam masalah gizi kronis yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya ialah kondisi sosial-ekonomi, gizi ibu ketika hamil, serta kurangnya asupan gizi. Dalam jangka panjang, *stunting* dapat menyebabkan anak kesulitan untuk mencapai pertumbuhan fisik maupun kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia sendiri berada pada angka 30,8%. Angka tersebut masih melebihi tingkat standar toleransi angka *stunting* dari WHO bagi suatu negara yaitu maksimal berada pada angka 20%. Untuk itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting* di Indonesia, maka ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Akan tetapi, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, rupanya belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, mengingat masih banyak permasalahan kesehatan di beberapa kota/kabupaten di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Kota Bandung yang mengalami permasalahan pembangunan kesehatan seperti permasalahan *stunting*.

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan angka *stunting* di Kota Bandung sebesar 2,39% menjadi 8,93%. Berikut persentase balita *stunting* di Kota Bandung pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Grafik 1.

Presentase Prevalensi *Stunting* Di Kota Bandung 2018-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2020

Dilihat dari grafik tersebut, angka *stunting* di Kota Bandung terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya fluktuasi ialah adanya pandemik Covid-19, terhentinya program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta pemukiman padat penduduk (Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2021). Dengan demikian, *stunting* menjadi permasalahan Kota Bandung yang harus diselesaikan. Apalagi jika dikaitkan dengan Kota Bandung yang sudah menerapkan konsep *smart city*, dimana taraf kesehatan masyarakat

menjadi salah satu indikator penting dalam *smart city* yang harus diwujudkan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari (Iqbal, 2021) Bahwasanya, *smart city* ialah perwujudan kota pintar yang berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, apabila dibandingkan dengan kota maupun kabupaten yang lain di Jawa Barat yang belum menerapkan konsep *smart city*, kota ataupun kabupaten tersebut justru memiliki angka prevalensi *stunting* lebih rendah dibanding Kota Bandung.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Presentase Angka *Stunting* Kota dan Kabupaten di Jawa barat**  
**Pada Tahun 2020**

No	Kota dan kabupaten	Presentase
1.	Kabupaten Karawang	2.54%
2.	Kabupaten Majalengka	5.29%
3.	Kota Bogor	7.65%
4.	Kota Bandung	8.86%

Sumber : Dinas Kesehatan Jawa Barat

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pemerintah Kota Bandung senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan pelayanan berbasis *smart city* melalui program Tanggap *Stunting* Dengan Pangan Aman dan Sehat (Tanginas) yang merupakan sebuah inovasi program Dinas Kesehatan yang berkolaborasi dengan TP PKK Kota Bandung dalam upaya membantu penurunan serta cegah *stunting* di Kota Bandung. Tujuan dari pada dibuatnya Program Tanginas itu sendiri ialah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat dalam hal kesehatan pada setiap keluarga di Kota Bandung meski pada perekonomian rendah dalam rangka mencapai *zero news stunting*. Di samping itu, selain sebagai wadah untuk menekan angka *stunting*, tetapi juga dibentuk dalam rangka mendukung penerapan Bandung *Smart city* (TP PKK Kota Bandung, 2020)

Ketua Pokja IV TP PKK Kota Bandung memaparkan, dalam penerapan program tanginas di Kota Bandung, terdapat upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberian asupan makanan sehat setiap 2 minggu sekali kepada 5 ibu hamil, 5 batuta dan 10 balita di setiap kelurahan. Sejalan dengan mekanisme penerapan program tanginas tersebut, Wakil Walikota Bandung memaparkan bahwasanya aparat pemerintah dilingkup pemerintahan Kota Bandung harus aktif dalam mengedukasi, mengajak serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan *stunting* ([humas.bandung.go.id](http://humas.bandung.go.id)). Urgensi daripada penanganan dini atau tindakan preventif oleh pemerintah Kota Bandung untuk menekan angka *stunting* akan mewujudkan Kota Bandung yang menjamin warganya dalam kondisi sehat, meski pada tingkatan perekonomian rendah (Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Hal tersebut juga akan merepresentasikan Kota Bandung sebagai wilayah yang menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakatnya serta dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kota berbasis *smart city*. Melalui riset dengan judul *Smart Cities Ranking of European Medium-sized Cities* yang dikemukakan oleh Griffinger, dkk (2007) istilah *smart city* untuk pertama kalinya dicetuskan sebagai kota pintar atau kota cerdas yang mampu mewujudkan kebutuhan manusia melalui berbagai aspek. Hasibuan (2019) menyatakan *smart city* didefinisikan sebagai kota pintar yang mampu memenuhi kualitas hidup yang lebih baik serta kenyamanan bagi warganya. Tujuan daripada adanya *smart city*, diharapkan dapat menciptakan suatu kota yang nyaman, aman, serta dalam rangka memperkuat daya saing global (Sulaiman, 2019).

Lebih jauh lagi, Cohen (2014) memaparkan *smart city* ialah suatu pendekatan yang komprehensif, terintegrasi dalam peningkatan efisiensi tata kelola suatu kota, kualitas hidup dapat meningkat serta menumbuhkan ekonomi di daerahnya. Selanjutnya, Cohen (2014) membagi konsep *smart city* ke dalam enam dimensi diantaranya ialah *smart governance*, *smart environment*, *smart economy*, *smart people*, *smart mobile* serta *smart living*.

**Gambar 1.**  
**Enam Dimensi *Smart city* Cohen (2014)**



Sumber : Bandung *Smart city Book*

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana optimalisasi program tanginas sebagai wujud dari diterapkannya *smart city* di Kota Bandung. Oleh sebab itu, penelitian terdahulu menjadi hal penting untuk menjadi referensi bagi peneliti. Maka dari itu, penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Essa *et al.*, 2021) yang berjudul *Strategies for Handling Stunting in Bandung City* yang bertujuan untuk menelaah strategi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung dalam penyelesaian *stunting*. Dimana penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *mix method* berdasarkan indeks resiko *stunting*.

Selain itu, penelitian terdahulu yang lain ialah ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Nabilah, 2021) dengan judul Penanganan *Stunting* Melalui Program Bandung Tanggap *Stunting* Dengan Pangan Aman Dan Sehat (Tanginas) Di Kecamatan Rancasari Kota Bandung, yang memiliki tujuan ialah untuk meninjau penyelenggaraan tentang penanganan *stunting* melalui program Bandung Tanginas di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Farhan *et al.*, 2021) yang berjudul *Digital Governance Pada Platform Simpati 2.0 di Kabupaten Sumedang*. Hasilnya menunjukkan platform simpati telah menyediakan informasi maupun kualitas data yang disajikan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih tidak dapat mengakses secara menyeluruh terkait informasi mengenai data *stunting* pada aplikasi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, *digital governance* pada simpati 2.0 belum berjalan dengan baik.

Untuk itu berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat terdapat relevansi dalam optimalisasi penanganan *stunting* di Kota Bandung dilihat dari perspektif *smart city*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam bagaimana penanganan *stunting* di

Kota Bandung dilihat dari perspektif *smart city*. Adapun novelty dari penelitian ini ialah belum adanya penelitian dalam hal optimalisasi permasalahan *stunting* di Kota Bandung yang ditinjau dari perspektif *smart city*. Sedangkan, rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana optimalisasi program Tanggap *Stunting* Dengan Pangan Aman Dan Sehat di Kota Bandung Dalam Perspektif *Smart city*.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kepustakaan dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai konsep *smart city* serta dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dalam melakukan penelitian serupa. Selain daripada itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk para pihak dalam pengembangan program *stunting* di Kota Bandung.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hal tersebut ditujukan untuk memberi gambaran mengenai optimalisasi program tanginas dalam perspektif *smart city* sebagai upaya penyelesaian *stunting* ditinjau dari perspektif informan dan tinjauan literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan wawancara secara terstruktur karena sumber data utama di dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata (Moleong, 2013), lalu ditambah dengan studi kepustakaan, dan dilengkapi dengan observasi dimulai dari tanggal 4 November hingga 4 Maret Tahun 2022 di sekitar lokus penelitian, yaitu Dinas Kesehatan, TP PKK Kota Bandung serta Kecamatan Batununggal. Bahan dan alat utama dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Singkatnya penentuan teknik tersebut dilatarbelakangi oleh perspektif peneliti bahwa informan tersebut yang paling mengetahui mengenai fokus penelitian yang dilakukan. Dengan tujuan untuk mendapatkan dan merinci informasi khusus mengenai optimalisasi program tanginas dalam perspektif *smart living* di Kota Bandung dari pelbagai macam sumber. Lalu, informan -informan di dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

#### Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	dr. H. Sonny Adam, M.M	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bandung
2	dr. Dewi Primasari	Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi, Dinas Kesehatan Kota Bandung
3	Eulis Sumiyati, S.Pt	Ketua Pokja 4 PKK Kota Bandung
4	Ketua PKK Kecamatan	Kecamatan Batununggal
5	Nai	Masyarakat Kecamatan Batununggal

Sumber: Diolah peneliti, 2022

Di dalam melakukan analisis data, peneliti memakai model analisis interaktif (*interactive model analysis*). Dimana terdiri dari tiga hal pokok yaitu *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing* (Sugiyono, 2016). Lalu, pemeriksaan dari keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi data dengan melakukan pengecekan pada berbagai sumber data (Moleong, 2013).

## Hasil dan Pembahasan

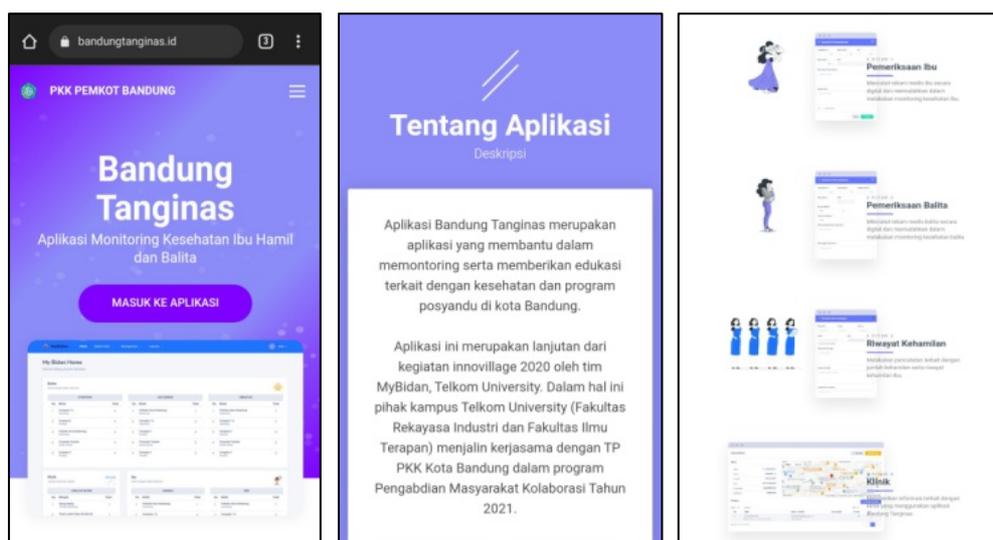
### 1. Smart Government

Pada prinsipnya, *smart governance* ialah bagian dari salah satu dimensi *smart city* yang berorientasi kepada tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan adil serta kualitas dan kuantitas layanan yang lebih baik (Pratama, 2014). *Smart governance* terdiri atas tiga bagian indikator yang dapat merepresentasikan bagaimana tata kelola pemerintahan yang berbasis *smart city* dapat diwujudkan. Pertama, adanya keikutsertaan publik atau masyarakat di dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun berbasis *online*. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Duadji (2013) bahwasanya, adanya keikutsertaan publik akan meningkatkan kualitas daripada isi keputusan yang dibuat dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah berbasis kepentingan dan pengetahuan riil yang terdapat di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan dibuatnya program tanginas untuk mengatasi permasalahan *stunting* di Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, TP PKK Kota Bandung beserta *stakeholders* yang lainnya juga turut melibatkan masyarakat sebelum dan sesudah dibuatnya program tanginas. Lebih lanjut lagi, Ketua Penggerak Program Tanginas menyatakan bahwasanya ia dan timnya turut serta melibatkan masyarakat atau Relawan Cegah *Stunting* (Ranting) yang di dalamnya merupakan sekumpulan masyarakat dan akademisi yang ditugaskan untuk ikut serta dalam sosialisasi serta edukasi mengenai *stunting* kepada masyarakat luas.

Kedua, adanya peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya, *smart city* senantiasa memanfaatkan teknologi informasi yang dapat dilakukan dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis *web* maupun *mobile* (Cohen, 2014). Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terutama di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyelenggarakan program tanginas yang kemudian dibuatnya aplikasi berbasis *website* yang bernama Bandung Tanginas.

Gambar 2.

### Tampilan Depan Aplikasi Bandung Tanginas



Sumber : bandungtanginas.id

Di dalam aplikasi Bandung Tanginas sudah tersedia beberapa fitur seperti Pemeriksaan Ibu yang mencatat rekam medis para ibu secara digital dengan adanya kemudahan dalam melakukan monitoring untuk kesehatan para ibu. Selanjutnya fitur Pemeriksaan Balita, di mana fungsinya sama dengan fitur pemeriksaan ibu. Yang terakhir ialah fitur Riwayat Kehamilan, yang mana mencatat mengenai jumlah kehamilan. Selain terdapat fitur seperti pemeriksaan ibu, balita dan kehamilan, aplikasi Bandung Tanginas juga sudah menyediakan kanal informasi mengenai layanan kesehatan khususnya mengenai *stunting* di Kota Bandung yang terintegrasi dengan *open data* Jawa Barat serta *website* Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kemudahan dalam mengakses informasi tersebut juga sudah cukup mudah didapatkan oleh masyarakat. Hal tersebut divalidasi oleh salah satu Kader PKK Kecamatan Batununggal dalam sesi wawancara dengan peneliti.

Ketiga, adanya transparansi di dalam pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan seksama informasi – informasi yang dibutuhkan. Dalam program tanginas maupun dalam pemberian informasi mengenai layanan kesehatan Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung berupaya untuk terus melakukan pelayanan terbaik secara cepat dan responsif. Hal tersebut guna agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dilihat dari dimensi *smart governance* dalam optimalisasi program tanginas di Kota Bandung, senantiasa dijalankan sesuai dengan pendekatan *smart city* atau wujud dari adanya Bandung *Smart city* dalam hal ini ialah peningkatan tata kelola pemerintahan di bidang kesehatan. Akan tetapi, dalam hal pemberian informasi public mengenai kesehatan ataupun *stunting* masih diperlukan upaya peningkatan dalam mekanisme penyampaiannya. Mengingat, Ketua RW 09 Kelurahan Kacapiring memaparkan, masih banyak masyarakat yang sulit untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan terkhususnya dalam pelayanan kesehatan.

## 2. Smart Economy

Adanya pengelolaan ekonomi di suatu daerah ataupun kota perlu dilakukan adanya peningkatan. Pada penerapan dan evaluasi *smart city*, *smart economy* meliputi 2 hal yang dapat merepresentasikan perwujudan *smart city* di suatu kota. Dalam hal ini ialah di Kota Bandung dalam rangka menangani permasalahan *stunting*. Pertama, adanya proses inovasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Di mana, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan dengan inovasi. *Smart city* kemudian dapat dikategorisasikan sebagai inovasi daerah sebagaimana pasal 386 yang menjelaskan mengenai makna dari inovasi yang merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka dari itu, bersamaan dengan dibentuknya program tanginas yang di dalamnya terdapat berbagai aspek mengenai sosialisasi tentang *stunting*, pemberian layanan kesehatan tetapi juga Dinas Kesehatan Kota Bandung turut menyediakan beberapa program ekonomi untuk mendorong keluarga maupun masyarakat di Kota Bandung agar mempunyai pendapatan yang seimbang sehingga mampu dan mandiri dalam pemberian makanan bergizi kepada anak di Kota Bandung.

Mengingat, dalam menangani permasalahan *stunting*, ada banyak aspek yang harus dilaksanakan salah satunya ialah perbaikan atau peningkatan pendapatan perekonomian pada masing-masing keluarga. Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan adanya rangkaian kegiatan seperti Buruan SAE yang merupakan salah satu kegiatan dalam program tanginas untuk budidaya sayuran dan protein untuk keluarga serta adanya kegiatan lain yaitu Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Akses Modal dan Pendampingan (UP2K). Kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk menyukkseskan Rumah Pangan Mandiri (RPM) berbasis keluarga, serta memberikan pelatihan bagi keluarga *stunting* sebagai upaya kemandirian penambahan pendapatan keluarga.

Gambar 3.

Kegiatan Buruan SAE serta Pelatihan UP2K di Kecamatan Ujung Berung



Sumber : TP PKK Kota Bandung

Kedua, kemampuan daya saing. Adanya kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mencapai perekonomian yang meningkat. Sebab inovasi maupun kemampuan daya saing ialah salah satu modal penting untuk kemajuan bangsa dalam peningkatan pembangunan. Arah pembangunan tersebut kemudian direalisasikan dengan akses yang ditingkatkan, pemerataan, mutu layanan sosial dasar serta peningkatan kualitas. Untuk itu, di samping mengatasi permasalahan *stunting*, masyarakat pun dapat meningkatkan pendapatannya yang tentunya didorong oleh pelayanan public yang lebih baik. Dari kedua program tersebut, Kota Bandung telah menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan *stunting* yang ditandai dengan dibuatnya beragam inovasi dalam satu rangkaian, tak hanya dari sisi kesehatannya saja akan tetapi dari beragam aspek seperti perekonomian masyarakatnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut, masih diperlukan dukungan dan pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat agar program – program yang menunjang pendapatan masyarakat dapat semakin berkembang dan berjalan secara *sustain*.

### 3. Smart People

Dalam mengatasi permasalahan *stunting*, tentunya membutuhkan pula modal manusia (human capital) untuk menunjang pembangunan suatu kota. *Smart people* merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan di dalam *smart city*. Suatu kota yang akan atau telah menerapkan *smart city*, artinya sudah mencakup dengan adanya kesediaan sumber daya manusia yang lebih unggul. Di dalam penerapan *smart city* di Kota Bandung, haruslah sudah didukung dengan masyarakat unggul yang dapat mewujudkan *smart city*. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari (Nijkamp et al., 2009) dalam Widyaningsih (2013), bahwasanya kota cerdas sebagai kota yang dapat menggunakan sumber daya manusia.

Namun dengan adanya permasalahan gizi seperti *stunting*, di mana hal tersebut akan mengakibatkan kepada kualitas sumber daya manusia menjadi menurun. Untuk itu, Dinas Kesehatan maupun TP PKK Kota Bandung terus berupaya untuk meningkatkan pendidikan, edukasi maupun intervensi pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Di dalam rangkaian program tanginas sendiri, nantinya akan ada pemerataan untuk relawan cegah *stunting*, sehingga penyampaian informasi mengenai *stunting* dapat cepat sampai kepada masyarakat maupun pemahaman masyarakat akan *stunting* dapat terus meningkat. Dengan adanya edukasi, mampu merubah pola perilaku kesehatan menjadi lebih baik secara mandiri. Dengan pengetahuan dan pemahaman kesehatan, masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah dan kebutuhan mereka sendiri, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mampu mengambil

keputusan tepat guna serta meningkatkan taraf hidup. Kemandirian dalam mempraktikkan gaya hidup sehat adalah modal terbesar untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat.

Di samping itu, tingkat pembangunan manusia di Kota Bandung masih dikatakan belum sepenuhnya lebih baik, pasalnya masih terdapat masyarakat yang belum memahami mengenai permasalahan *stunting* maupun permasalahan kesehatan lainnya ujar Ketua Kader Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Di samping itu, pemerataan pendidikan sangat penting diwujudkan oleh pemerintah baik pendidikan formal maupun informal. Mengingat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 sebesar 81,51 yang berarti angka tersebut masih berada di bawah kota lain di Indonesia seperti Yogyakarta, Semarang maupun Surabaya yang juga telah menerapkan *smart city* (Badan Pusat Statistik, 2021).

#### 4. Smart Mobility

Smart mobility ialah dimensi *smart city* yang meninjau transportasi serta mobilitas masyarakat. Pada prosesnya, diharapkan mampu tercipta layanan publik untuk mengurangi mobilitas masyarakat, polusi maupun kepadatan penduduk. Dalam hal permasalahan *stunting*, kepadatan penduduk menjadi salah satu aspek yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun oleh *stakeholders* yang lain. Didalam mapping pembuatan program tanginas, diketahui 9.567 balita dari 193.294 balita di Kota Bandung mengalami *stunting*. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya kepadatan penduduk. Sehingga, dampak dari adanya kepadatan penduduk akan mengakibatkan permasalahan seperti *Open Defecation Free* (ODF) atau buang air besar sembarangan. Di mana kondisi tersebut akan berpengaruh kepada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Seperti yang dapat diketahui, bahwasanya *stunting* dapat terjadi secara kontinu apabila gaya hidup tidak sehat pada masyarakat akan mengakibatkan lebih banyak penderita *stunting* (Dinas Kesehatan Kota Bandung).

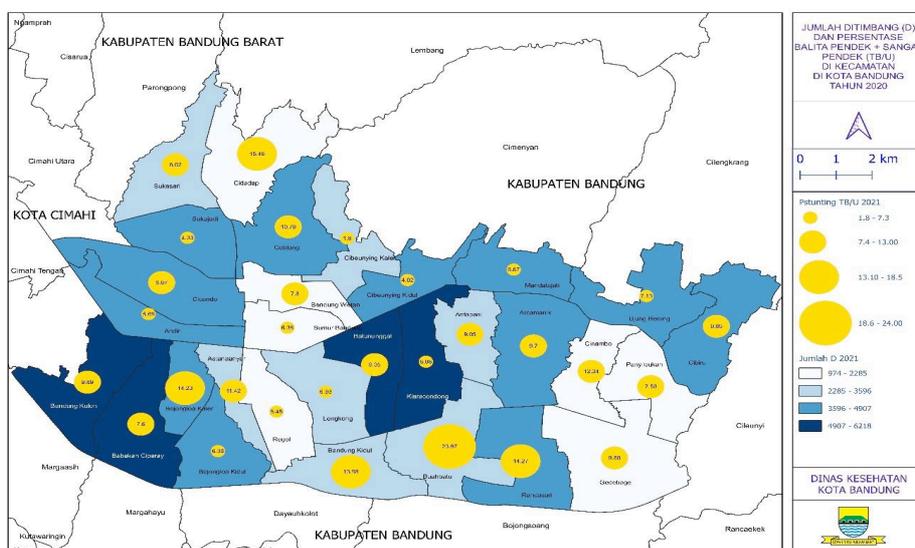
Untuk itu, pada program tanginas terdapat pula upaya untuk mengurangi persentase ODF di Kota Bandung dengan diadakannya kegiatan ODF 100% di mana di dalamnya terdapat kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kota dalam mengakses air bersih, sanitasi maupun jamban bersih keluarga. Dari upaya – upaya tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Kota Bandung dengan Zero News *Stunting*.

#### 5. Smart Living

Pada penerapan *smart city*, tentunya dilandaskan juga oleh dimensi smart living. Dimana Cohen (2014), mendefinisikan smart living merupakan dimensi pada *smart city* mengenai gaya hidup masyarakat, berdasarkan perilaku dan kebiasaan konsumsi dalam menjaga kesehatan. Dalam menangani permasalahan *stunting* di Kota Bandung, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Bandung, memaparkan bahwasanya untuk saat ini, gaya hidup masyarakat merupakan hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Pasalnya, semakin berkembangnya zaman, gaya hidup atau pola hidup sehat masyarakat berubah secara cepat serta sulit untuk dirubah. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dipaparkan oleh Ketua Tim Penggerak Program Tanginas, bahwa *stunting* dapat terjadi secara turun menurun bukan berarti dari faktor genetik atau keturunan saja melainkan dari gaya hidup yang tidak sehat yang kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya, sehingga dapat menyebabkan *stunting*.

Dari hal tersebut di atas kemudian menyebabkan sebesar 2,27% atau 2.434 Balita berada pada status sangat pendek dan 6,65% atau 7.133 Balita berstatus pendek. Apabila ditelaah berdasarkan kewilayahan, Kecamatan Buahbatu memiliki persentase Balita *stunting* tertinggi 23,97% atau sebanyak 824 Balita, diikuti oleh Cidadak 15,46% dengan sejumlah 291 Balita, dan Rancasari 14,27% Balita dengan sejumlah 546 Balita. Persentase balita yang mengalami *stunting* berdasarkan kecamatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 4.**  
**Presentase Baita *Stunting* Berdasarkan Kecamatan Di Kota Bandung**  
**Pada Tahun 2020**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung (2021)

Wilayah perkotaan tak hanya menghadapi tingginya angka balita yang mengalami permasalahan gizi (*stunting*), akan tetapi juga dapat mengalami pula permasalahan balita dengan gizi berlebih. Kondisi gizi berlebih juga dapat berdampak pada estetika penampilan seseorang. Pencegahan maupun penanganan permasalahan gizi dapat dilakukan dengan merubah pola makan dan pola hidup. Pola makan haruslah diatur sejak dini melalui asupan gizi yang seimbang (Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2021). Untuk itu, dalam penyelenggaraan program tanginas, Dinas Kesehatan beserta TP PKK Kota Bandung turut menggelar kegiatan rutin seperti pemberian pangan sehat, tak hanya untuk balita tetapi juga diberikan kepada ibu hamil serta baduta.

**Gambar 5.**  
**Pendistribusian Pemberian Asupan Pangan Sehat**  
**Oleh Tim Penggerak Program Tanginas**



Sumber: TP PKK Kota Bandung (2022)

Dalam pemberian asupan pangan sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan *stunting*. Sebagaimana Kementerian Kesehatan memaparkan bahwasanya terdapat tiga hal penting dalam pencegahan *stunting*, salah satunya yaitu dengan adanya perbaikan terhadap pola makan. Akan tetapi, pemberian

asupan pangan sehat tersebut belum sepenuhnya merata sampai ke penjuru kota. Untuk itu diperlukan lebih banyak lagi pasokan makanan sehat serta dukungan dari berbagai pihak, agar masyarakat senantiasa mendapatkan makanan yang sehat sehingga melahirkan kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat. Dengan demikian, pola makan dan gaya hidup sehat akan terbentuk di masyarakat.

### 6. Smart Environment

Di dalam penerapan *smart city*, hal terakhir yang perlu diwujudkan ialah dengan menciptakan lingkungan yang pintar, bersih serta aman. Manifestasi daripada adanya perwujudan lingkungan yang sehat ialah bagian dari diterapkannya dimensi *smart environment* dalam implementasi *smart city*. Aspek lingkungan menjadi hal yang juga diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan seperti *stunting*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwasanya, lingkungan yang kotor maupun bersih akan berdampak kepada keberlangsungan makhluk hidup didalamnya. *Smart environment* dalam *smart city* memiliki karakteristik yang harus diwujudkan oleh implementor seperti ketersediaan air bersih, sanitasi air serta adanya ruang terbuka hijau. Untuk itu, dalam penyelenggaraan program tanginas, didalamnya terdapat pula kegiatan yang dinamakan Sanitasi Lokal Berbasis Masyarakat (SLBM) Siap lawan *Stunting*. Di mana di dalam kegiatan tersebut terdapat Upaya Pelaksanaan Pengelolaan 5 pilar SLBM berupa penyediaan fasilitas dalam mewujudkan Kota Bandung ODF 100%, penyediaan air bersih bagi seluruh keluarga dan pengelolaan sampah rumah tangga.

Kegiatan SLBM diselenggarakan dengan bentuk melakukan pemecuan SLBM di 15 wilayah, membuat Septictank komunal di 30 kecamatan serta penyediaan akses sumber air bersih di 15 wilayah. Selain dengan adanya SLBM, terdapat pula kegiatan lain yaitu pembagian bibit tanaman dan paket budidamber yang merupakan optimalisasi halaman dengan menanam tanaman pangan di halaman rumah dan pelatihan budidaya ikan lele bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan dan keluarga 1000 HPK sebagai upaya meningkatkan gizi untuk mencegah *stunting*. Berdasarkan adanya kedua kegiatan tersebut pemerintah sudah berupaya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat berbasis *smart environment* dalam penerapan *smart city*. Namun, perwujudan dimensi *smart environment* belum sepenuhnya diwujudkan dengan optimal, mengingat ada salah satu indikator yang belum terlaksana seperti masih minimnya ruang terbuka hijau serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penerapan *smart environment*.

### Simpulan

Kota Bandung merupakan salah satu Kota di Jawa Barat yang telah menerapkan *smart city* sejak diresmikan pada tahun 2016 lalu. Namun, di samping capaian reformasi pelayanan publik yang berhasil membuat kota lain di Indonesia turut menerapkan pula konsep *smart city*, Kota Bandung masih memiliki permasalahan seperti permasalahan kesehatan salah satunya ialah adanya *stunting*. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan angka *stunting* di Kota Bandung yakni sebesar 8,86% (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2021). Mengetahui permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Kesehatan yang berkolaborasi dengan TP PKK Kota Bandung mengambil langkah untuk menangani permasalahan *stunting*, dengan menyelenggarakan program Bandung Tanginas (Tanggap *Stunting* Dengan Pangan Aman Dan Sehat) yang merupakan suatu program pencegahan *stunting* terintegrasi di Kota Bandung.

Semua kegiatan yang terdapat didalam program Bandung Tanginas sudah mencakup beberapa indikator yang perlu diwujudkan dalam menyelesaikan permasalahan *stunting* berdasarkan indikator prevalensi *stunting* yang kemudian diintegrasikan dengan

pengimplementasian Bandung *Smart city*. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat masih belum dapat mengakses secara menyeluruh informasi mengenai *stunting*, keterbatasan asupan pangan sehat, minimnya ruang terbuka hijau, kepadatan penduduk serta penggunaan teknologi informasi yang masih minimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi program tanginas belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari karakteristik penerapan *smart city*.

### Referensi

- Ahmad, A. (2018). Pengembangan Internet Of Things Pada *Smart city*. *Jurnal Sistem Cerdas*, 38-45.
- Anisah. (2017). Usulan Perencanaan *Smart city*: Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Komuko. *Dinas Komunikasi Dan Informatika*, 59-80.
- Bandung, D. K. (2019). *LKIP 2018*. Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Bandung, D. K. (2019). *Rencana Strategis 2018-2023*. Bandung: Dinas Kesehatan Bandung.
- Bandung, D. K. (2020). *Profil Kesehatan Kota Bandung 2020*. Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Barat, P. D. (2018). *RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023*. Jawa Barat: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Cohen, B. (2014). What Is Smart Cities For Information System Research In Africa? Review Protocol And Initial Application Research. *Proceeding Of The African Cyber Citizenship Conference 2014* (p. 129). South Africa: Nelson Mandela Metropolitan University.
- Hadi, S. (2021). *Capaian Tantangan Dan Peluang Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2018-2024*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden.
- Hasibuan, A. (2019). *Smart city*, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota Di Kota Besar Provinsi Sumatera Barat. *Buletin Utama*, 127-135.
- Haskas, Y. (2020). Gambaran *Stunting* Di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 154-157.
- Iqbal, M. (2021). *Smart city* In Practice: Learn From Taipei City. *Journal Of Governance And Public Policy*, 50-59.
- Malang, P. K. (2019). *Roadmap Smart city Kota Malang*. Malang: Bappelitbang.
- Presiden, S. W. (2021). *Laporan Capaian: Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2020*. Jakarta: Kementerian Negara RI Sekretariat Wakil Presiden.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan *Stunting* Dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 225-229.
- RI, T. R. (2018). Situasi Balita Pendek (*Stunting*) Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Sakti, F. T. (2018). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kelola*, 2.

- Sakti, F.J., Suparman, S. (2020). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia. *LP2M*.
- Sutriyawan, A., & Nadhira, C. C. (2020). Kejadian *Stunting* Pada Balita Di UPT Puskesmas Citarip Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa*, 79-88.
- Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1781>
- UGM, T. P. (2016). *Roadmap Kota Yogyakarta Menuju Smart city*. Yogyakarta: Working Paper PSPPR .